

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM NEGOSIASI DISIPLIN SUBSIDI PERIKANAN DI FORUM WTO

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :
FATIMAH FARAH MONA
07041381823143

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

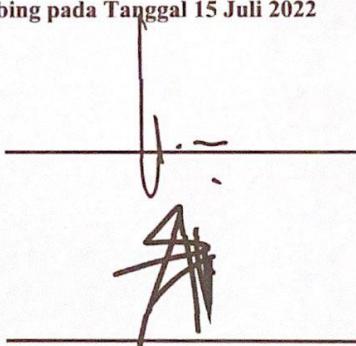
**KEBIJAKAN INDONESIA DALAM NEGOSIASI DISIPLIN SUBSIDI
PERIKANAN DI FORUM WTO**
SKRIPSI

Disusun oleh :

FATIMAH FARAH MONA
07041381823143

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 15 Juli 2022
Pembimbing I

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM
NIP. 19600209186031004

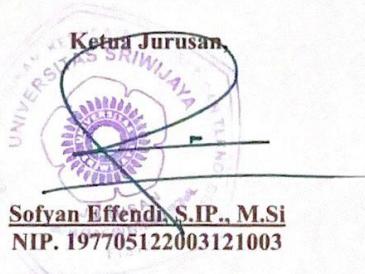


Pembimbing II

Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA
NIP. 199104092018032001



Mengetahui,



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**KEBIJAKAN INDONESIA DALAM NEGOSIASI DISIPLIN
SUBSIDI PERIKANAN DI FORUM WTO**

SKRIPSI

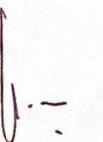
Oleh :

FATIMAH FARAH MONA
07041381823143

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 28 Juli 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

PEMBIMBING :

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM
NIP. 19600209186031004
Sari Mutiara Aisyah, S.I.P., MA
NIP. 19910092018032001




PENGUJI :

Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.
NIP. 198708192019031006
Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn.
NIDN. 0009029110





LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Farah Mona

NIM : 07041381823143

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN INDONESIA DALAM NEGOSIASI DISIPLIN SUBSIDI PERIKANAN DI FORUM WTO” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 15 Juli 2022
Yang membuat pernyataan



Fatimah Farah Mona
NIM 07041381823143

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Dengan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini akan penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua penulis, Bapak Irlansyah dan Ibu Elly Kurniaty, yang selalu memberikan dukungan penuh, kasih sayang, nasihat, semangat, serta doa yang tiada henti yang terus dicurahkan kepada penulis.
2. Kedua saudara penulis, Kakak Aka Putra Pratama dan Abdullah Ayub Siraj, yang juga selalu memberikan dukungan, nasihat, semangat, dan doa terbaik untuk penulis.
3. Keluarga dan sahabat terdekat penulis yang selalu senantiasa memberikan semangat dan dukungan untuk penulis.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya ikan yang melimpah. Sektor perikanan Indonesia memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan keamanan pangan negara. Sayangnya, potensi sumber daya perikanan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur, sehingga masih banyak nelayan kecil yang berada di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan subsidi dari pemerintah. Dengan perundingan disiplin subsidi perikanan di WTO, partisipasi aktif Indonesia menjadi salah satu kebijakan dan strategi Indonesia dalam mempertahankan hak-hak Indonesia sebagai anggota negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam negosiasi disiplin subsidi perikanan di WTO. Untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut, penelitian ini menggunakan teori *Rational Choice* dari Peter Abell. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data-data yang dikumpulkan berupa data primer melalui hasil wawancara dan data sekunder yang didapat dari sumber tertulis lain berupa buku, jurnal, penelitian, serta dokumen resmi terkait subsidi perikanan. Mengacu pada teori yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi kebijakan Indonesia yaitu faktor kondisi domestik dan ekonomi Indonesia, struktur dalam negeri dan struktur WTO, serta hak-hak internasional yang ingin dipertahankan oleh Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan Indonesia, Negara Berkembang, Subsidi Perikanan, Perundingan WTO, Sektor Perikanan

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM
NIP. 19600209186031004

Dosen Pembimbing II

Sari Mutiara Aisyah, S.I.P., M.A
NIP. 199104092018032001

Palembang, 6 September 2022

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi

Sofyan Efendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

Indonesia holds the title as the largest Archipelagic State in the world with abundant fisheries resource potential. Indonesia's fisheries sector plays a notable role for the nation's economic growth and its food security. Unfortunately, the fisheries potential has not been fully utilized due to limited infrastructures, so that there are still considerable numbers of small-scale fishers who are living below the poverty line and need financial support from the government. With the WTO Negotiations on Fisheries Subsidies, Indonesia's participation can be a policy and a strategy at a time in maintaining Indonesia's rights as a developing country member. This research aims to explain the factors that affect Indonesia's policy in WTO Negotiations on Fisheries Subsidies. To find out these factor, this study uses Peter Abell's rational choice theory. The descriptive qualitative method is applied in this study. The data were collected in the form of primary data through interviews and secondary data that were obtained from written sources in the form of books, journals, research, and documents related to fisheries subsidies. Referring to the theory, it can be concluded that there are several factors that affect Indonesia's policy such as Indonesia's domestic and economic conditions, domestic and the WTO structures, and Indonesia's specific international rights.

Key Words : Developing Countries, Fisheries Sector, Fisheries Subsidies, Indonesia's Policy, WTO Negotiations

Acknowledged by,

Advisor I

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM
NIP. 19660209186031004

Advisor II

Sari Mutiara Aisyah, S.I.P., M.A
NIP. 199104092018032001

Palembang, September 6th, 2022



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Indonesia dalam Negosiasi Disiplin Subsidi Perikanan di Forum WTO”. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing KKHI yang telah memberikan waktu, bimbingan, saran dan motivasi, serta kepercayaan kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan waktu, bimbingan, saran dan motivasi, serta kepercayaan kepada Penulis selama masa studi hingga akhir proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muchammad Yustian, S.S., M.Si selaku Dosen Pengaji I yang telah memberikan saran dan arahan kepada Penulis untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pengaji II yang telah memberikan saran dan arahan kepada Penulis untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dandy Satria Iswara, S.IP., M.Si selaku Direktur Perundingan Multilateral pada masa penulis melaksanakan KKHI yang banyak memberikan bantuan dan arahan selama pelaksanaan KKHI.
9. Mas Taufan Agung Pratama, S.H., M.H. selaku Negosiator Perdagangan Ahli Muda Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia yang juga anggota dari Tim Kerja 5 Subsidi Perikanan yang telah bersedia memberikan waktunya untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
10. Bapak Panut Suroso, S.E., MM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, serta motivasi untuk penulis selama masa KKHI dan selama proses penyusunan skripsi.
11. Ibu Nina Priastri, S.IP., M.Si.M. dan Mbak Maryam, S.IP. selaku Pembimbing Teknis KKHI serta Mentor / Pendamping Pembimbing Teknis KKHI yang telah banyak

memberikan arahan, bantuan serta pembelajaran bagi Penulis selama masa KKHI di Kementerian Perdagangan RI dan proses pengajuan judul skripsi.

12. Seluruh staff dan pegawai Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.
13. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas segala ilmu dan dedikasi yang diberikan selama masa perkuliahan.
14. Seluruh staff Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi.
15. Kedua orangtua, saudara, dan keluarga Penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan sepenuhnya dan selalu memanjatkan doa yang tiada henti bagi Penulis dan demi kelancaran serta kemudahan bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada teman-teman terdekat penulis yaitu Aliyah, Aurora, Tiara, Fakhirah, dan Atikah yang selalu memberikan semangat dan dukungan emosional kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
17. Kepada Karenina, Gabriel, Sindy, Lisnalia, Safira, dan teman-teman HI B 2018 Bukit lainnya yang selalu membantu, meluangkan waktu untuk berdiskusi, serta menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
18. Harry, Jungkook, Seokjin, dan Bangtan Sonyeondan yang telah menjadi inspirasi dan sebagai pemberi semangat untuk Penulis dalam menjalankan perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi.
19. *The one and only, my-precious-self, for doing really well and still rockin' it this far.*

Demikian kata pengantar ini penulis buat. Penulis sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik Bapak/Ibu, keluarga, dan teman-teman mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan penelti selanjutnya di kemudian hari.

Palembang, 10 Juli 2022

Penulis



Fatimah Farah Mona
NIM 07041381823143

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Kerangka Teori	15
2.2.1. <i>Rational Choice Theory</i>	15
2.3. Alur Pemikiran.....	21
2.4. Argumentasi Utama.....	21
BAB III.....	23
METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1. Desain Penelitian.....	23
3.2. Definisi Konsep	23
3.2.1. Subsidi	23

3.2.2. Special and Differential Treatment	24
3.3. Fokus Penelitian	24
3.4. Unit Analisis	26
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5.1. Jenis Data.....	27
3.5.2. Sumber Data.....	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data	28
3.7. Teknik Keabsahan Data	28
3.8. Teknik Analisis Data.....	29
3.8.1. Reduksi Data	29
3.8.2. Penyajian Data	29
3.8.3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi.....	30
BAB IV	31
GAMBARAN UMUM	Error! Bookmark not defined.
4.1. Subsidi Perikanan	31
4.1.1. Definisi Subsidi.....	31
4.1.2. Definisi Subsidi Perikanan	32
4.2. Aturan Subsidi di WTO	34
4.2.1. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement).....	34
4.2.2. Kategori Subsidi dalam SCM Agreement	35
4.2.3. Special and Differential Treatment	36
4.3. Jenis-jenis Subsidi Perikanan	37
4.4. Potensi Industri dan Subsidi Perikanan Indonesia	38
4.5. Negosiasi <i>Fisheries Subsidies</i> di Forum WTO.....	45
4.5.1. Dinamika Perkembangan Negosiasi <i>Fisheries Subsidies</i> di WTO.....	45
4.5.2. Substansi <i>Agreement on Fisheries Subsidies</i>	48
BAB V	50
PEMBAHASAN	50
5.1. Optimality	50
5.1.1. Posisi dan Fokus Indonesia di Perundingan <i>Fisheries Subsidies</i> WTO	51
5.2. Structures	55
5.2.1. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	56
5.2.2. Doha Mandate and Hongkong Mandate	57

<i>5.2.3. Special and Differential Treatment</i>	58
<i>5.3. Self-regarding Interest</i>	58
<i>5.3.1. Hak Nelayan Kecil dan Keberlanjutan Perikanan Indonesia</i>	59
<i>5.3.2. Hak Internasional Indonesia</i>	59
BAB VI.....	62
PENUTUP.....	62
<i>6.1. Kesimpulan</i>	62
<i>6.2. Saran</i>	64
<i>6.2.1. Saran Teoritis</i>	64
<i>6.2.2. Saran Praktis</i>	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.3.1 Fokus Penelitian	25
Tabel 4.4.1. Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPRI.....	40
Tabel 4.4.2. Notifikasi Subsidi Indonesia.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 KUSUKA	43
Gambar 2.. Kawasan Segitiga Terumbu Karang	51

DAFTAR SINGKATAN

ACP	: <i>African, Caribbean, and Pacific Countries</i>
EU	: <i>European Union</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
IPOA	: <i>International Plan of Action</i>
IUU	: <i>Illegal, Unreported and Unregulated</i>
KTM	: Konferensi Tingkat Menteri
KUB	: Kelompok Usaha Bersama
LDCs	: <i>Least Developed Countries</i>
MC	: <i>Ministerial Conference</i>
NGR	: <i>Negotiating Group on Rules</i>
PUMP	: Pengembangan Usaha Mina Pedesaan
RFMOs	: <i>Regional Fisheries Management Organizations</i>
SCM	: <i>Subsidies and Countervailing Measures</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDT	: <i>Special and Differential Treatment</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UU	: Undang-undang
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
WPPNRI	: Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, mata pencaharian masyarakat, serta keamanan pangan global. *Food and Agriculture Organization* (FAO) memperkirakan sekitar 75% produksi ikan global merupakan konsumsi manusia dan sebagian besar sisanya menjadi bahan untuk produk lainnya seperti minyak ikan atau pakan ternak. Perikanan dan hasil laut sangat penting bagi ketahanan pangan yaitu sebagai penyedia 20% kebutuhan protein hewani untuk rata-rata 3.3 miliar orang. Perkembangan sektor perikanan juga sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi terutama bagi negara-negara berkembang atau negara yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Pada tahun 2018, diperkirakan sekitar 59.5 juta orang terlibat dalam sektor perikanan dan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata dari total konsumsi ikan meningkat sekitar 3.1%. (Kemendag, 2020)

Perdagangan ikan dan jenis produk hasil laut lainnya kemudian menaikkan tingkat konsumsi ikan sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan untuk banyak orang. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dari perikanan global dan memastikan stok ikan tetap terjaga hingga ke depannya. Apabila tidak dikelola dengan baik, stok ikan akan semakin menipis dan akan terjadi *overfishing*. *Overfishing* merupakan kondisi dimana penangkapan atau eksplorasi ikan dilakukan secara berlebihan sehingga stok ikan terus berkurang bahkan terancam habis sehingga tidak ada ikan lagi yang tersisa untuk ditangkap. Kondisi ini nantinya akan berdampak ke banyak hal seperti kerusakan ekosistem, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan juga berdampak buruk terhadap

perkembangan sosial dan ekonomi. (Wati, 2014) *Overfishing* merupakan ancaman serius untuk stok ikan global dan ekosistem laut lainnya.

Berdasarkan data dari FAO pada tahun 2020, hampir 60% *assessed stocks* telah dieksplorasi dan hanya 34% dari penangkapan ikan global berada dalam level *sustainable*. FAO juga menyatakan bahwa stok ikan beresiko mengalami penurunan drastis di beberapa bagian di dunia karena terjadi overeksplorasi. (FAO, Sustainable Development Goals, 2020) Kondisi ini diakibatkan oleh kapitalisasi terhadap armada penangkapan ikan global yang berlebihan dan pemberian subsidi. Entitas publik global telah menyediakan subsidi untuk industri perikanan dengan jumlah USD 35.4 miliar di tahun 2018. Dari berbagai jenis subsidi perikanan, subsidi berupa peningkatan kapasitas adalah subsidi dengan tingkat paling tinggi yang diberikan, yaitu sebesar USD 22.2 miliar. Selain itu, subsidi bahan bakar (termasuk pembebasan pajak khusus bahan bakar) merupakan jenis subsidi terbesar yaitu 22% dari total subsidi global, yang kemudian diikuti oleh subsidi pengelolaan perikanan sebesar 19% dan pembebasan pajak non-bahan bakar yaitu 15% dari total subsidi. Dilihat dari setiap wilayah di dunia, Asia merupakan wilayah yang paling besar memberikan subsidi yaitu sejumlah 55% dari total, yang kemudian disusul Eropa sebesar 18%, dan Amerika Utara yaitu 13%. (Sumaila, et al., 2019) Melihat betapa pentingnya sektor perikanan dan urgensi ini, negara-negara di dunia kemudian berupaya untuk melakukan perundingan terkait peraturan dalam sektor perikanan dalam sebuah forum multilateral.

WTO atau *World Trade Organization*, sebagai suatu organisasi perdagangan dunia yang memiliki 154 anggota, merupakan salah satu organisasi yang paling berpengaruh dalam mengatur sistem perdagangan dunia. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang mendukung liberalisasi baik barang maupun jasa. WTO juga berupaya untuk mengatur dalam ketentuannya mengenai perdagangan yang tidak adil. Salah satu kebijakan negara yang dianggap tidak adil dalam hal ini adalah subsidi. Subsidi merupakan tindakan yang dianggap

“*unfair*” dalam perdagangan internasional karena memiliki kemungkinan untuk merugikan pihak yang terkena dampak dari praktik subsidi itu sendiri. Pada dasarnya, subsidi adalah instrumen fiskal untuk memaksimalkan peran negara dalam kegiatan ekonomi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. (Yustika, 2008) Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), subsidi dapat berupa bantuan uang ataupun bantuan lainnya yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada perkumpulan, yayasan, dan pihak lain yang merupakan warga negaranya. Dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* di *World Trade Organization* (WTO), dijelaskan bahwa subsidi merupakan bantuan finansial dari pemerintah dalam teritori suatu negara. Bantuan tersebut dapat berupa uang, potongan pajak, infrastruktur, atau pembayaran yang seharusnya dibebankan pada pihak swasta. Dalam ketentuan WTO, subsidi masih dapat diberikan selama ketentuan subsidi tersebut tidak merugikan atau berdampak buruk kepada negara atau pihak lainnya. (WTO, *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, 2021)

Disiplin subsidi perikanan menjadi sebuah pembahasan yang telah bertahun-tahun ini menjadi perdebatan antar anggota WTO. Menurut FAO, subsidi perikanan merupakan program atau aksi pemerintah berupa bantuan yang terkhusus diberikan untuk industri perikanan, yang menyebabkan perusahaan atau industri tersebut memperoleh keuntungan yang melebihi keuntungan yang seharusnya mereka peroleh apabila tidak mendapat program tersebut. (FAO, What is a fisheries subsidy?, 2003) Keuntungan yang dimaksud dapat berupa keuntungan jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Terdapat beragam jenis dari subsidi perikanan seperti subsidi bahan bakar, program pengembangan usaha perikanan, pembangunan dan renovasi pelabuhan perikanan, bantuan kepada nelayan, dan masih banyak jenis bantuan lainnya. (KKP, 2020) Namun, bantuan atau subsidi perikanan oleh pemerintah telah berpengaruh terhadap kapitalisasi terhadap armada penangkapan ikan global yang berlebihan

dan tidak berada dalam level *sustainable*. Hal ini menjadi alasan mengapa diperlukan regulasi atau pengaturan terkait subsidi perikanan. (Kemendag, 2020)

Proses negosiasi disiplin subsidi perikanan telah menjadi perbincangan di WTO sejak tahun 2001 pada *Doha Ministerial Conference*. Dilanjutkan pada *Hong Kong Ministerial Conference* pada tahun 2005 yang mulai menentukan pelarangan terhadap bentuk subsidi tertentu yang mengakibatkan *overcapacity* dan *overfishing*. Sejak saat itu, negosiasi subsidi perikanan semakin berkembang. Pada Konferensi Tingkat Menteri ke-10 di Nairobi, anggota tetap melanjutkan negosiasi meskipun masih banyak terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan antara negara maju, negara berkembang, dan LDCs (*Least Developed Countries*). Diskusi ini semakin berkembang dan meluas membahas mengenai hal-hal lain terkait subsidi perikanan, seperti *overfishing*, *overcapacity*, transparansi, IUU Fishing, prinsip *Special and Differential Treatment*, dan sebagainya. Pada tahun 2017, para anggota WTO kembali mengintensifikasi upaya mereka dalam mencapai hasil negosiasi subsidi perikanan yang telah dibahas selama bertahun-tahun. Sebelum Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-11 pada tahun 2017, telah terkumpul sebanyak 7 proposal oleh *Negotiating Group on Rules* (NGR) yang terdiri dari Uni Eropa, Indonesia, Norwegia, African Caribbean Pacific, LDCs, New Zealand, Iceland, Pakistan, dan China.

Dari sejumlah proposal yang ada, muncul beragam pendekatan dan kepentingan masing-masing kelompok terkait disiplin subsidi perikanan dan perbedaan pandangan ini tetap berlanjut hingga KTM ke-11 di Buenos Aires 2017 lalu. KTM Buenos Aires menghasilkan mandat untuk menghapuskan beberapa jenis subsidi yang berakibat ke *overcapacity*, *overfishing*, dan IUU Fishing namun tetap juga memperhatikan pentingnya *Special and Differential Treatment* (SDT) untuk anggota negara berkembang dan LDCs. Prinsip SDT ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi negara berkembang dalam forum

perdagangan internasional. Perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju, berkembang, dan LDCs menjadi alasan mengapa prinsip ini dapat diterapkan. (Indonesia, 2017)

Sebagai salah satu negara berkembang sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia, laut dan perikanan memainkan peran penting bagi Indonesia. Sektor perikanan berkontribusi besar untuk ketahanan pangan sekaligus mata pencaharian di Indonesia. Menurut Indonesia *Marine Full Report*, Indonesia merupakan negara urutan ke-8 di dunia sebagai negara paling bergantung dengan sektor perikanan jika diukur dari kebutuhan protein masyarakatnya. Dalam hal mata pencaharian, sektor tangkap ikan dan *aquaculture* telah mempekerjakan sekitar 2.7 juta dan 3.3 juta orang. Ditambah lagi, lebih dari 1 juta pekerja juga terlibat dalam pengolahan dan pemasaran produk ikan. Apabila diukur dari *Gross Domestic Product* (GDP) nasional, sektor perikanan Indonesia meningkat sebanyak 7.3% pada 2014 dan 6.8% pada 2017. Sektor perikanan Indonesia telah berkontribusi terhadap GDP nasional, keamanan pangan, serta mengembangkan perusahaan pada sektor-sektor terkait seperti energi, telekomunikasi, logistik, dan *ecotourism*. (CEA, 2018)

Indonesia juga telah lama meratifikasi perjanjian WTO dan resmi menjadi negara anggota. Hal ini tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Sebagai negara anggota, Indonesia harus melakukan penyesuaian berbagai peraturan kebijakan perdagangannya menurut ketentuan WTO. Dengan meratifikasi perjanjian tersebut, WTO telah menjadi bagian dari perundang-undangan domestik dimana Indonesia harus mematuhi kebijakan WTO dengan konsisten dan menyesuaikan kebijakan nasional dengan instrumen-instrumen dalam perjanjian WTO. Perlu diingat bahwa keanggotaan Indonesia di WTO tidak hanya memberikan peluang dalam perdagangan internasional namun juga terdapat ancaman yang harus kita waspadai. Subsidi

diyakini dapat memperbaiki pasar dan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Meskipun negosiasi subsidi perikanan ini telah dibahas secara khusus berkali-kali dalam forum WTO namun negosiasi ini belum mencapai kata sepakat hingga hari ini. Masih terdapat substansi-substansi di dalamnya yang mengalami proses negosiasi panjang karena melibatkan perbedaan kepentingan negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang seperti Indonesia terus memperjuangkan kepentingan nasional dan nasib nelayan-nelayan skala kecil yang jumlahnya lebih dominan dibandingkan dengan perikanan skala besar. Hasil dari Konferensi Tingkat Menteri ke-11 tahun 2017 lalu dan dokumen *Draft Consolidated Chair* terbaru juga masih menyisakan pasal-pasal krusial yang masih harus dinegosiasikan kembali. Mulai dari ruang lingkup, larangan subsidi, serta substansi lainnya terkait notifikasi subsidi perikanan. Penting untuk Indonesia untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam negosiasi ini karena hasil atau kesepakatan dari negosiasi ini akan bersifat mengikat.

Dari latar berlakang permasalahan tersebut, penulis akan meneliti bagaimana Indonesia sebagai negara berkembang menentukan kebijakan dan strateginya untuk melindungi kepentingan nasional tanpa melanggar ketentuan dari perjanjian WTO. Penulis juga akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam negosiasi disiplin subsidi perikanan di WTO.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Faktor apa yang mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam negosiasi disiplin subsidi perikanan di WTO?”

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan bagaimana kebijakan yang diambil Indonesia dalam mempertahankan negosiasi subsidi perikanan di Forum WTO.
2. Menjelaskan apa faktor yang mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam negosiasi subsidi perikanan di WTO.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam dunia akademik khususnya untuk Ilmu Hubungan Internasional yang terkait dengan diplomasi serta kepentingan nasional suatu negara dalam perdagangan internasional ataupun yang berfokus pada subsidi perikanan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai subsidi perikanan dan partisipasi Indonesia di WTO
- Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya yang terkait, mengingat negosiasi subsidi perikanan di WTO belum sepenuhnya mencapai kesepakatan.
- Sebagai informasi bagi pembaca ataupun nelayan yang mendapatkan subsidi perikanan dari pemerintah agar mampu menghadapi pembatasan subsidi perikanan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abell, P. (2003). The Role of Rational Choice and Narrative Action Theories in Sociological Theory The Legacy of Coleman's Foundations. *Vol. 44, No. 2, La théorie du choix rationnel: Les "Foundations of Social Theory" de James S. Coleman: En débat.*
- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burns, T., & Roszkowska, E. (2016). Rational Choice Theory: Toward a Psychological, Social, and Material Contextualization of Human Choice Behavior. *Theoretical Economics Letters*, 195 - 207.
- Carter, E. (2022). Kondisi Laut : Indonesia Jilid Satu Gambaran Umum Pengelolaan Sumber Daya Laut untuk Perikanan Skala Kecil dan Habitat Laut Penting di Indonesia. *Proyek Sustainable Ecosystems Advanced (SEAD) USAID dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI .*
- CEA. (2018). *Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia*. California Environmental Associates.
- Christijanto, H. (2020, September 8). Subsidi Perikanan, Keberlanjutan Usaha Nelayan Kecil, Pembangunan Perikanan Berkelanjutan. *Workshop Perkembangan Perundingan Fisheries Subsidies WTO*. Jakarta, DKI Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Craig, R. K. (2017). Climate Change and Common but Differentiated Responsibilities for the Ocean . *Carbon & Climate Law Review Vol. 11 No. 4 Special Issue on the Changing Prospects for Climate Law and Policy in the US*, 325-334.
- Daniel, M. (2002). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Elster, J. (1989). Social Norms and Economic Theory. *Journal of Economic Perspectives Vol.3 No. 4*, 99-117.

Eugui, D. V., Bellmann, C., & OK, T. (2019). A development perspective on WTO fish subsidies negotiations. *UNCTAD Research Paper no. 35*.

FAO. (2001). *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal,*

Unreported and Unregulated Fishing. Retrieved from WTO:

https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/fish_e/2001_ipoa_iuu.pdf

FAO. (2003). *What is a fisheries subsidy?* Retrieved from Food and Agriculture

Organization: <http://www.fao.org/3/y4446e/y4446e0k.htm>

FAO. (2020). *Sustainable Development Goals.* Retrieved from Food and Agriculture

Organization of the United Nations: <http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1441/en/>

Fukasaku, K. (2000). Special and Differential Treatment for Developing Countries : Does It Help Those Who Help Themselves. *UNU World Institute for Development Economics Research (UNU/WIDER) Working Papers no. 197.*

Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary (8th Edition).* Minnesota, USA: West, Thomson Business.

Green, D. P., & Shapiro, I. (1961). The Nature of Rational Choice Theory. In *Pathologies of Rational Choice Theory : A Critique of Applications in Political Science.*

Kleen, P., & Page, S. (2005). Special and Differential Treatment of Developing Countries in the World Trade Organization. *Global Development Studies No. 2, Ministry for Foreign Affairs Sweden.*

KBBI. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).* Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/subsidi>

Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif.* Malang: UMM Press.

Indriantoro, & Supomo. (2010). *Metode Penelitian.* Jakarta: PT. Gramedia

- Indonesia. (2017, June 6th). *TN/RL/GEN/189 Proposed Disciplines on Prohibitions and Special and Differential Treatment for Fisheries Subsidies*. Retrieved from World Trade Organization.
- Kemendag. (2020, September 8). *Perundingan Subsidi Perikanan sebagai Komitmen Sistem Perdagangan Multilateral (MTS)*. Retrieved from Ditjen PPI Kemendag RI.
- Kiranayanti, M. (2009). Subsidi Perikanan dalam Kerangka WTO : Suatu Tinjauan terhadap Proposal Indonesia dan Kepentingan Nasional. *Universitas Indonesia*.
- KKP. (2020). *Subsidi Perikanan, Keberlanjutan Usaha Nelayan Kecil, Pembangunan Perikanan Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Kumar, R., Kumar, R. R., Stauvermann, P. J., & Arora, P. (2020). Effects of Fisheries Subsidies Negotiations on Fish Production and Interest Rate. *Journal of Risk and Financial Management*.
- Manan, M. (2015). Foreign Policy and National Interest : Realism and Its Critiques. *Global & Strategis Th.9 No. 2*.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyati, A., & Iswara, D. S. (2021, July 18). *Tekan Penangkapan Ikan Ilegal, Indonesia Dukung Pembentukan Disiplin Subsidi Perikanan di WTO* . Retrieved from Kementerian Perdagangan Republik Indonesia:
[https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/tekan-penangkapan-ikan-legal-indonesia-dukung-pembentukan-disiplin-subsidi-perikanan-di-wto-1](https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/tekan-penangkapan-ikan-illegal-indonesia-dukung-pembentukan-disiplin-subsidi-perikanan-di-wto-1)
- Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy : A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*.
- Ogu, M. I. (2013). RATIONAL CHOICE THEORY: ASSUMPTIONS, STRENGHTS, AND GREATEST WEAKNESSES IN APPLICATION OUTSIDE THE WESTERN

MILIEU CONTEXT. *Arabian Journal of Business and Management Review*

(*Nigerian Chapter*) Vol. 1, No. 3.

Randall, A. (1983). The Problem of Market Failure. *Natural Resources Journal* Vol. 23 Issue 1 Winter 1983, 131-148.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33.

Rudy, T. M. (2002). *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Jombang: Jakarta PT Intermasa.

Schrank, W., & Keithly, W. (1999). The Concept of Subsidies. *Marine Resource Economics* Vol.14 No. 2, 151-164.

Sitanggang, D. F. (2019). Disiplin Subsidi Perikanan dalam Sistem Perdagangan Global dan Implikasinya bagi Perikanan Indonesia. *Veritas et Justitia* Vol. 5 Universitas Katolik Parahyangan.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumaila, U. R., Khan, A. S., Dyck, A. J., Watson, R., Munro, G., Tydemers, P., & Pauly, D. (2010). A Bottom-Up Re-Estimation of Global Fisheries Subsidies. *Journal of Bioeconomics* Vol. 12 Issue 3.

Sumaila, U. R., Ebrahim, N., Schuhbauer, A., Skerritt, D., Li, Y., Kim, H. S., . . . Pauly, D. (2019). Updated Estimates and Analysis of Global Fisheries Subsidies. *Marine Policy* 109 (2019) 103695.

Taufan Agung Pratama, S. M. (2022, Juli 6). Negosiator Perdagangan Ahli Muda, Anggota Tim Kerja 5 Subsidi Perikanan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI. (F. F. Mona, Interviewer)

Theola, D. (2018). Strategi Indonesia dalam Mempertahankan Fisheries Subsidies di Forum WTO. *Universitas Kristen Indonesia*.

UIO. (2022, June 23). *Detailed Presentation of Subsidies and Countervailing Measure in the WTO*. Retrieved from WTO E-Learning:

<https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5850/h17/tekster/overview-subsidies.pdf>

Wati, R. P. (2014). Dampak Kelebihan Tangkap (Overfishing) Terhadap Pendapatan Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir . *JOM.Fekon Vol.1. No. 2 Oktober 2014.*

Weldes, J. (1996). Constructing National Interest. *European Journal of International Relations.*

Westlund, L. (2004). *Guide for Identifying, Assessing, and Reporting on Subsidies in the Fisheries Sector*. Roma: FAO.

Widayanto, S. (2016). WTO Melindungi Kepentingan Domestik Negara Anggotanya Secara Optimal. *Jurnal Tinjauan Perdagangan Indonesia, TMDI, Kementerian Perdagangan RI, EDISI No. 35 Tahun 2016 – ISSN: 0852 – 2772.*

Widjaya, S. (2020, Maret 12). *Masih Terjadi, Ini Dampak Negatif dari Praktik IUU Fishing*. Retrieved from Mongabay : Situs Berita Lingkungan:

<https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iuu-fishing/>

Witjaksono, D. B. (2021, Juli 18). Tekan Penangkapan Ikan Ilegal, Indonesia Dukung Pembentukan Disiplin Subsidi Perikanan di WTO.

WTO. (1994). Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.

WTO. (2006). *World Trade Report* . World Trade Organization.

WTO. (2007). Annex VIII SCM Agreement. *Doc. TN/RL/W/123.*

WTO. (2021, August 21st). *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*. Retrieved from World Trade Organization: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf

- WTO. (2022, June 17). *Agreement on Fisheries Subsidies Ministerial Decision of 17 June 2022*. Retrieved from WTO:
<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/33.pdf&Open=True>
- WTO. (2022, Juni 20). *Subsidies and Countervailing Measures : Overview*. Retrieved from World Trade Organization:
- Wu, C. C.-H. (2017). Understanding the Structures and Contents of National Interests: An Analysis of Structural Equation Modeling. *The Korean Journal of International Studies Vol. 15 No. 3*.
- Yustika, A. E. (2008). Refleksi Subsidi dalam Perekonomian Indonesia. *Bisnis & Ekonomi Politik, Vol. 9(3), Juli 2008.*
- Yusuf, A., Ariadno, M. K., & Afriansyah, A. (2015). Legal Framework and Mechanism of Marine Fisheries Subsidies in the Aspects of International Trade and Sustainable Development. *Indonesian Law Review Vol. 5 Number 3*
https://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/subs_e.htm#:~:text=The%20SCM%20Agreement%20creates%20two,into%20one%20of%20these%20categories.